PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Madukoro Blok AA – BB Kompleks PRPP Semarang
Telepon 024 – 7600247 PABX 7608533, 7603586, 7608581
Faksimile 024 – 7608202, 7608434

K E R A N G K A A C U A N K E R J A
(K A K)

PEKERJAAN :
STUDI PERENCANAAN PENANGANAN
PERMUKIMAN TERDAMPAK BENCANA

LOKASI :
KABUPATEN BANJARNEGARA
KABUPATEN BANYUMAS
KABUPATEN CILACAP

Tahun Anggaran 2017

KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)
STUDI PERENCANAAN PENANGANAN PERMUKIMAN TERDAMPAK BENCANA

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan wilayah yang sering terjadi bencana alam. Berbagai bencana alam yang sering terjadi antara lain seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, angin kencang, kebakaran hutan, dan lain-lain. Setiap jenis bencana tersebut mempunyai tingkat bahaya yang bervariasi dan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda tergantung pada karakteristik fisik, sosial, dan ekonomi daerah yang terlanda. Kecenderungan terhadap terjadinya bencana untuk saat ini maupun masa yang akan datang masih cukup besar dan ada kemungkinan akan bertambah jenisnya.

Bencana longsor dan banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, terutama di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai frekuensi kejadian longsor yang sangat tinggi dan hampir setiap tahun mengalami peningkatan yang dipicu dengan kondisi topografi mulai dari curam sampai sangat curam yang dikombinasikan dengan curah hujan yang tinggi, dimana curah hujan yang tinggi telah menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor menimpa beberapa wilayah bagian selatan Jawa Tengah diantaranya adalah Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Banjarnegara.

Berdasarkan data informasi kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2016 di Kabupaten Purworejo terjadi bencana longsor dan banjir, dengan lokasi terjadinya adalah di Kecamatan Gebang, Kecamatan Purworejo, Kecamatan Banyuurip, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Bayan, Kecamatan Bagelan, Kecamatan Purwodadi, dan Kecamatan Ngombol. Bencana tersebut telah mengakibatkan korban meninggal mencapai 46 orang, selain itu juga terdapat kerugian-kerugian lainnya yakni 100 rumah rusak akibat tertimpa longsoran tanah, 41 rumah rusak akibat banjir, 28 rumah rusak berat, dan 3 jembatan rusak.

Pada Kabupaten Banjarnegara di tahun 2014 terjadi bencana longsor yang menimpa Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Dalam bencana ini korban meninggal dunia mencapai 95 orang, sekitar 105 unit rumah tertimbun longsor beserta lahan sawah dan perkebunan masyarakat. Pada tahun 2016 di Kabupaten Banjarnegara juga kembali terjadi bencana longsor yaitu menimpa Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, dan Desa Clapar, Kecamatan Madukara.

Bencana yang terjadi di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Banjarnegara telah mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan material yang sangat besar karena terjadinya

kerusakan tempat tinggal dan fasilitas umum. Kerusakan rumah dan pemukiman serta fasilitas penunjangnya terutama akibat bencana tanah longsor di kedua wilayah Kabupaten tersebut perlu mendapatkan perhatian karena tentunya akan berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup masyarakatnya. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mencari atau menentukan lokasi pembuatan rumah ataupun permukiman yang baru sebagai tempat relokasi bagi masyarakat yang telah terkena bencana, karena tentunya lokasi rumah yang lama yang telah tertimbun longsoran tidak memungkinkan dibangun rumah kembali serta daerah/lokasinya tersebut juga rawan terjadinya bencana lagi yang serupa.

Tantangan yang dihadapi sekarang adalah bagaimana menentukan lokasi relokasi atau permukiman kembali bagi para korban bencana yang memungkinkan dan aman terhadap terjadinya bencana lagi untuk membantu mereka kembali mendapatkan kualitas hidup seperti sebelum terjadinya bencana atau bahkan mungkin bisa lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah menyusun Studi Perencanaan Penanganan Permukiman Terdampak Bencana ini, dimana diharapkan dapat menemukan lokasi relokasi yang tepat dan sesuai atau lebih baik dari kondisi sebelumnya sehingga dapat dibangun tempat tinggal atau permukiman baru yang lebih baik dan berkelanjutan.

2. TUJUAN DAN SASARAN

2.1.Tujuan

Tujuan pelaksanaan studi perencanaan penanganan kawasan permukiman terdampak bencana adalah sebagai berikut :

1. Untuk menyusun penanganan relokasi permukiman terdampak bencana
2. Untuk menyusun rencana tapak relokasi permukiman terdampak bencana
3. Pedoman dalam penentuan kebijakan prioritas penanganan relokasi permukiman terdampak bencana di wilayah kajian.

2.2.Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan studi perencanaan penanganan kawasan permukiman terdampak bencana adalah :

1. Tersusunnya rencana penanganan relokasi permukiman terdampak bencana
2. Tersusunnya rencana tapak relokasi permukiman terdampak bencana

3. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

3.1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dari studi perencanaan penanganan permukiman terdampak bencana, adalah :

a. Kabupaten Banjarnegara
b. Kabupaten Banyumas
c. Kabupaten Cilacap

3.2. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup materi Studi Perencanaan Penanganan Permukiman Terdampak Bencana ini meliputi beberapa tahapan, dimana garis besar tahapan pelaksanaannya adalah dimulai dari tahap persiapan, tahap pengumpulan data dan informasi, tahap pengolahan dan analisis data dan tahap penyusunan rencana, yang secara rincinya meliputi:

1. Menyesuaikan dan berpedoman kerangka acuan kerja Studi Perencanaan Penanganan Permukiman Terdampak Bencana;
2. Melakukan survey/observasi lapangan mengenai kondisi lapangan wilayah;
3. Mengkaji data primer atau sekunder;
4. Mengkaji isu-isu strategis (potensi dan permasalahan) di wilayah perencanaan;
5. Mengkaji kebijakan penanganan bencana dan relokasi permukiman di wilayah perencanaan;
6. Mengkaji faktor –faktor yang dipertimbangkan dalam pelaksanaan relokasi permukiman;
7. Melakukan pengelolaan data dan analisis data terhadap karakteristik kondisi asal maupun kondisi tujuan lokasi relokasi permukiman;
8. Merumuskan rencana tapak pada lokasi relokasi permukiman terdampak bencana

4. PENGERTIAN

4.1. Pengertian

Studi Perencanaan Penanganan Permukiman Terdampak Bencana yaitu suatu kajian sebagai upaya penentuan lokasi relokasi permukiman yang terdampak bencana secara tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
- **Bencana Alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
- **Wilayah Rawan Bencana** adalah wilayah yang untuk jangka waktu tertentu tidak mampu mengurangi dampak buruk dari suatu bahaya (geologis, hidrologis, biologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi). Definisi ini sangat luas sehingga dapat disimpulkan bahwa kawasan rawan bencana adalah wilayah yang rentan terhadap perubahan yang merusak.
- **Relokasi** adalah pemindahan tempat atau pemindahan dari suatu lokasi ke lokasi lain

- **Permukiman** adalah bagian dari lingkungan hunian yang tediri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

4. PENDEKATAN, METODOLOGI DAN RENCANA KERJA

a. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan studi ini adalah :

- Pendekatan Komprehensif
- Pendekatan Fleksibilitas
- Pendekatan Referensif (literature)
- Pengamatan langsung di lapangan
- dan lain-lain

b. Metodologi

Metode pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut :

- Survei Instansional dan literature
- Survei Lapangan
- Survei Wawancara
- dan lain-lain

Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah :

- Analisis Deskriptif
- Analisis Scoring
- Analisis SWOT
- dan lain-lain

5.3. Rencana Kerja

Penyusunan Rencana Tapak Relokasi Permukiman Terdampak Bencana

a. Profil relokasi permukiman terdampak bencana.
b. Identifikasi permasalahan dan potensi relokasi permukiman terdampak bencana
c. Analisis model penanganan relokasi permukiman terdampak bencana
d. Konsep dan model penanganan relokasi permukiman terdampak bencana
e. Pembuatan album peta penanganan permukiman terdampak bencana
    - Peta persebaran daerah rawan bencana di Jawa Tengah
    - Peta persebaran permukiman terdampak bencana di wilayah kajian

- Peta persebaran lokasi relokasi permukiman terdampak bencana di wilayah kajian
- Peta rencana penanganan relokasi permukiman terdampak bencana

g. Gambar rencana tapak perencanaan relokasi permukiman terdampak bencana
   - Gambar siteplan
   - Gambar detail rumah sederhana sehat meliputi denah, tampak depan dan tampak samping
   - Gambar detail PSU perumahan meliputi jalan, drainase dan PJU.

h. Rencana Anggaran Biaya dan Spesifikasi Teknis

6. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan dari studi perencanaan penanganan permukiman terdampak bencana adalah sebagai berikut:

a. Profil relokasi permukiman terdampak bencana
b. Konsep dan model penanganan relokasi permukiman terdampak bencana
c. Rencana tapak relokasi permukiman terdampak bencana
d. Album peta penanganan permukiman terdampak bencana
   a. Peta persebaran daerah rawan bencana di Jawa Tengah
   b. Peta persebaran kawasan permukiman terdampak bencana
   c. Peta rencana penanganan relokasi permukiman terdampak bencana
e. Perencanaan teknis relokasi permukiman terdampak bencana meliputi :
   - Gambar siteplan relokasi permukiman
   - Gambar detail rumah sederhana sehat : denah, tampak depan dan tampak samping
   - Gambar detail prasarana sarana dan utilitas (PSU) perumahan : jalan, drainase dan penerangan jalan umum
   - Rencana anggaran biaya (RAB)
   - Spesifikasi teknis

7. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN KONSULTAN

a. Konsultan diwajibkan untuk melakukan seluruh persiapan dan mobilisasi sumberdaya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas seperti tercantum pada ruang lingkup.
b. Dalam Pelaksanaan pekerjaannya konsultan agar selalu berkonsultasi dengan Tim Teknis, yang susunannya disampaikan kemudian.
c. Laporan pendahuluan, antara dan akhir harus dikoordinasikan dengan Bappeda dan DPU di Kab/Kota masing-masing.

d. Paparan laporan pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir dengan tim teknis yang dilaksanakan di Semarang.
e. FGD hasil Studi ini dengan Bapeda/Dinas PKP Kabupaten yang dipusatkan di Semarang.
f. Bertanggung jawab pada KPA & PPTK

8. LAPORAN HASIL STUDI

Jenis laporan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa adalah:

A. Laporan Pendahuluan, meliputi **:**

a. Pendahuluan : Latar Belakang, Maksud, Tujuan dan Sasaran, Landasan Hukum, Ruang Lingkup Pekerjaan, Keluaran dan Tanggapan terhadap KAK;
b. Kajian Teori / Literatur dan Tinjauan Kebijakan
c. Gambaran Umum Wilayah Kajian;
d. Pendekatan dan Metodologi
e. Rencana Kerjama Laporan ini disampaikan 2 (dua) minggu setelah SPMK sebanyak 5 (lima) buku.

B. Laporan Antara, meliputi :

a. Kajian Kebijakan Kabupaten/Kota terkait penanganan kawasan permukiman terdampak bencana
b. Definisi relokasi permukiman terdampak bencana
c. Kriteria relokasi permukiman terdampak bencana
d. Analisis penanganan relokasi permukiman terdampak bencana

Laporan antara disampaikan 3 (tiga) bulan setelah SPMK sebanyak 10 (sepuluh) buku.

C. Laporan Akhir, meliputi :

a. Profil relokasi permukiman terdampak bencana.
b. Permasalahan dan Potensi relokasi permukiman terdampak bencana
c. Konsep dan Model Pengembangan relokasi permukiman terdampak bencana
d. Peta Penanganan relokasi permukiman terdampak bencana
e. Perencanaan teknis penanganan relokasi permukiman terdampak bencana meliputi gambar perencanaan, rencana anggaran biaya dan spesifikasi teknis.

Laporan akhir disampaikan 6 (enam) bulan setelah SPMK sebanyak 10 (sepuluh) buku.

D. Executive Summary

Laporan Executive Summary merupakan Ringkasan / Rangkuman dari Laporan Pendahuluan hingga Laporan Akhir , berisikan intisari (point –point utama) yang dapat menggambarkan proses secara menyeluruh dan komprehensif (terhubung dengan benang-benang merah yang jelas) serta berisi matriks-matriks kesimpulan dan peta.

Laporan Executive Summary dibuat sebanyak 10 buku, beserta CD, diserahkan paling lambat pada akhir jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

9. TENAGA AHLI

Untuk melaksanakan tujuannya, konsultan harus menyediakan tenaga yang memenuhi ketentuan pekerjaan, baik ditinjau dari segi lingkup (besar) pekerjaan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan. Tim Leader dan Tenaga ahli yang ditugaskan harus telah memiliki **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Sertifikat Keahlian (SKA)** di bidangnya masing-masing.

A. Tenaga ahli yang dibutuhkan, antara lain :

No	Tenaga Ahli	Jumlah	Pendidikan	Pengalaman
1	Ahli Perencana Wilayah dan Kota sebagai Team Leader	1	S1 Perencana Wilayah dan Kota	2 tahun
2	Ahli Teknik Sipil/Arsitek	1	S1 Teknik Sipil/Arsitek	1 tahun
3	Ahli SIG	1	S1 Teknik Geodesi/Geografi/Planologi	1 tahun

B. Tenaga Pendukung yang dibutuhkan, antara lain :

No	Tenaga Pendukung	Jumlah	Pendidikan
1	Tenaga administrasi	1	SLTA/Sederajat
2	Drafter	2	D3 Sipil/Arsitektur/planologi
3	Tenaga Surveyor	6	D3 Sipil / D3 Arsitektur /D3 planologi
4	Tenaga Estimator	1	D3 Sipil / D3 Arsitektur /D3 planologi

10. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan Studi Perencanaan Penyediaan Relokasi Permukiman Bagi Korban Bencana dilakukan selama 3 (tiga) bulan, terhitung dari sejak tangal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Untuk itu konsultan dimintakan menyusun rincian jadwal dan mobilisasi tenaga ahli dalam kurun waktu yang ditetapkan .

No	Kegiatan	Bulan		
		I	II	III
1	Administrasi			
2	Laporan Pendahuluan			
3	Survey			
4	Laporan Antara			
5	Laporan Akhir			

11. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

12. Sumber Pedanaan

Biaya pelaksanaan seluruhnya Rp. 135.000.000,00 (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) dibebankan APBD Provinsi Jawa Tengah, Tahun Anggaran 2017.

13. Pelaporan

Materi teknis dan semua produk pada tahapan dalam lingkup kegiatan disusun sebagai berikut:

- Laporan Pendahuluan (A4) 5 buku
- Laporan Antara (A4) 5 buku

- Laporan Akhir (A4) 5 buku
- Executive Summary (A5) 10 buku
- Album Peta (A3) 10 buku
- Soft copi CD 10 CD

  (format E-book dan peta bentuk digital CITRA dan SHP)

Ditetapkan,
Semarang, 7 Februari 2017

Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Perumahan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Ir.ARIEF DJATMIKO,MA